

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TAMBAHAN PELAKU
KEKERASAN SEKSUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN
2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(TINJAUAN PUTUSAN NOMOR. 126/PID.SUS/2015/PN.PBG)**

Erika Kemal Pasa

Abstrak

Tesis ini membahas masalah Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekersan Dalam Rumah Tangga. Dari hasil penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dan diperoleh kesimpulan bahwa pengaturan sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dinilai tidak cukup efektif untuk menopang efektivitas penerapan sanksi pidana pokok dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga. Hal itu dikarenakan jangkauannya hanya terbatas, yaitu untuk memberikan kebebasan kepada hakim menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dengan kata lain, tidak dimaksudkan untuk memberikan tambahan sanksi terhadap pidana pokok yang bersifat pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang yang mengatur sanksi pidana di luar KUHP. Konsekuensinya, sanksi pidana tambahan tersebut tidak dapat diterapkan untuk mengefktifkan penerapan sanksi pidana penjara atau denda terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan akibat luka berat atau matinya korban. Agar Pengaturan Sanksi Pidana Tambahan yang lebih efektif untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana kekerasan di rumah tangga ke masa depan, maka perlu memperluas norma Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tidak hanya dibatasi untuk memberikan kebebasan kepada hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan dengan maksud untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku dan menjaga keutuhan rumah tangga, tetapi diperluas sebagai penopang pidana pokok dan perlindungan rasa aman kepada korban baik secara materiel maupun immateriel. Jenis sanksi pidana tambahan yang seharusnya dapat diformulasikan, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah ganti kerugian materiel maupun immaterial terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik terhadap suami, isteri, dan anak, Pemecatan terhadap pelaku yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, TNI, Polri, dan Pemecatan dari jabatan kenegaraan, Pencabutan terhadap hak-hak tertentu, seperti : pengasuhan anak, perwalian dan/atau pengampunan.

Kata Kunci: Efektivitas, Sanksi Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga

**EFFECTIVENESS OF APPLYING ADDITIONAL CRIMINAL SANCTION
SECURITIES BY SEXUAL VIOLENCE BY LAW NUMBER 23 YEAR 2004
REGARDING ELIMINATION OF VIOLENCE IN HOUSEHOLD
(REVIEW OF DECLINE NUMBER 126/PID.SUS/2015/PN.PBG)**

Erika Kemal Pasa

Abstract

This thesis discusses the effectiveness of the regulation of additional criminal sanctions in Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Household Sergeants. From the research results using normative legal research methods and obtained the conclusion that the regulation of additional criminal sanctions based on Article 50 of Law Number 23 Year 2004 on the Elimination of Domestic Violence, considered not effective enough to sustain the effectiveness of the application of basic criminal sanctions in the act of violence at home stairs. This is because the scope is only limited, ie to provide freedom to judges to impose a criminal trial with the intent to conduct coaching of the perpetrator and maintain the integrity of the household. In other words, it is not intended to impose additional sanctions on the principal punishment, as provided for in Article 10 of the Criminal Law Code and the Law which regulates criminal sanctions outside the Criminal Code. Consequently, the additional criminal sanctions are not applicable to the effectiveness of imprisonment or fines imposed on domestic violence in the case of injury or death of the victim. In order to provide more effective enforcement of additional effective criminal sanctions to provide legal protection for victims in future domestic violence crimes, it is necessary to extend the norms of Article 50 of Law Number 23 Year 2004. Not only is it limited to granting freedom to judges in the imposition of criminal experiments with a view to guiding the perpetrator and preserving the integrity of the household, but expanded as the principal criminal support and protection of the victim's security both material and immaterial. The types of additional criminal sanctions that should be formulated, other than as stipulated in Article 50 of Law Number 23 Year 2004, are compensation for material and immaterial damages against victims of domestic violence against husbands, wives and children, Dismissal of offenders who have the status of Civil Servants, Armed Forces, Police, and Dismissals from State posts, Deprivation of certain rights, such as: parenting, guardianship and / or abilities.

Keywords: Effectiveness, Criminal Sanction, Domestic Violence